



PAD, Dana Transfer Ke Daerah, Belanja Modal Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Wilayah Flores Provinsi NTT

Leonardus P.M. Watu Sugi¹, Made Mertha²

^{1,2}. Universitas Udayana

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

This study aims to determine the effect of regional original revenue, transfer funds, and capital expenditures to the financial performance of the regencies in Flores, East Nusa Tenggara. The financial performance is measured by regional income growth. This research is conducted in 9 regencies in Flores NTT Province. The research design in this study is a quantitative study with an associative approach. The data used in this research is secondary data in the form of budget realization data in 9 Regencies in Flores for the fiscal years 2017-2020 with 36 sample. This study uses multiple linear regression analysis techniques. The result of analysis show that regional original revenue have a negative but not significant effect on the financial performance of 9 Regency Governments in Flores. Transfer funds have a positive but not significant effect on the financial performance of 9 Regency Governments in Flores. Capital Expenditures has a positive and significant effect on the financial performance of 9 Regency Governments in Flores.

Keywords: *Regional Original Revenue, Transfer Funds, Capital Expenditure, Local Government's Financial Performance.*

(*) Corresponding Author: ardus.leonardus303@gmail.com

How to Cite: Sugi, L. P. M. W., & Mertha, M. (2024). PAD, Dana Transfer Ke Daerah, Belanja Modal Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Wilayah Flores Provinsi NTT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10637807>.

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah secara resmi pada tahun 1999 menyebabkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perimbangan keuangan. Pengelolaan keuangan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Regulasi yang mengatur hal tersebut kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan keuangan ini menyebabkan pemerintah daerah diberikan ruang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dalam rangka mengatur pelaksanaan pemerintahan, pemberian layanan bagi masyarakat, serta pembangunan sarana dan prasarana. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan nilai yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi APBD setiap daerah di Indonesia memiliki alokasi APBD berbeda-beda sesuai kemampuan keuangan daerah.

Terdapat 9 Kabupaten yang terletak di wilayah Flores juga mengelola keuangannya berdasarkan APBD. Wilayah Flores memiliki potensi yang besar dan kuat dalam bidang pertanian dan pariwisata. Salah satu wisata di Flores yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah Labuan Bajo. Salah satu komoditi pertanian yang cukup terkenal dari wilayah Flores adalah kopi arabika. Tabel berikut akan menyajikan realisasi pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah dan juga belanja modal Pemerintah Kabupaten di wilayah Flores dalam kurun waktu 2017- 2020.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Wilayah Flores Tahun 2017- 2020

Kabupaten	Realisasi PAD (dalam Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
Manggarai Barat	123.431.811.303	103.347.460.592	169.954.164.787	99.340.732.324
Manggarai	128.829.520.073	89.904.635.201	103.585.928.127	96.873.499.091
Manggarai Timur	85.878.937.145	44.007.083.306	54.434.713.624	47.552.521.549
Ngada	62.338.200.372	41.355.093.831	51.258.423.809	48.795.069.324
Nagekeo	46.163.603.354	30.850.179.939	31.068.286.544	33.159.170.059
Ende	95.236.245.984	61.247.210.694	70.076.220.203	93.974.547.626
Sikka	118.177.114.975	100.868.194.503	99.619.556.108	119.601.046.361
Flores Timur	57.525.204.746	39.412.772.298	61.167.170.317	52.535.561.927
Lembata	37.992.916.559	42.882.808.398	51.718.451.391	44.244.016.164

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2022

Tabel 2 Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten di Wilayah Flores Tahun 2017-2020 Realisasi Dana Transfer ke Daerah (dalam Rupiah) Kabupaten

	2017	2018	2019	2020
Manggarai Barat	694.499.261.725	766.724.359.546	757.465.726.320	956.058.622
Manggarai	815.008.601.474	807.048.799.228	880.007.846.510	791.615.772.467
Manggarai Timur	684.256.194.414	764.510.441.819	786.724.967.841	709.706.370.362
Ngada	641.449.913.286	590.861.900.755	636.952.267.242	552.879.962.051
Nagekeo	576.105.600.035	559.693.838.683	638.951.136.810	570.980.766.458
Ende	782.964.345.582	814.101.126.524	934.172.845.582	819.926.389.628
Sikka	781.738.364.148	815.667.524.215	896.834.859.563	765.074.025.024
Flores Timur	742.819.982.629	834.457.769.010	826.592.869.578	775.773.210.089
Lembata	564.128.647.041	609.846.592.558	693.396.582.067	611.356.311.973

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2022

Tabel 3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten di Wilayah Flores Tahun 2017-2020 Realisasi Belanja Modal (dalam Rupiah) Kabupaten

	2017	2018	2019	2020
Manggarai Barat	271.151.094.733	254.087.794.413	242.995.865.618	174.969.249.200
Manggarai	228.268.283.670	270.097.299.924	260.133.775.217	206.921.382.491
Manggarai Timur	191.426.688.686	215.578.923.416	273.777.797.529	180.154.629.304
Ngada	268.221.134.057	156.457.674.962	176.113.229.722	101.328.305.740
Nagekeo	190.180.029.283	150.912.124.380	199.305.537.466	117.443.332.875
Ende	230.182.375.895	150.890.979.572	247.418.186.730	187.393.337.571
Sikka	186.930.504.005	144.034.860.186	192.989.791.558	93.001.041.921

Flores Timur	127.983.807.923	190.777.763.874	159.981.094.376	133.793.476.680
Lembata	113.059.810.243	160.628.410.139	214.079.867.468	160.535.891.652

Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2022*

Berdasarkan ketiga data yang telah ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa dana transfer ke daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten di wilayah Flores terhadap dana transfer ke daerah dalam melaksanakan kegiatan belanja daerah masih cukup tinggi. Selain itu, dapat dilihat bahwa jumlah belanja modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di kesembilan Kabupaten ini lebih besar dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan. Hal ini berarti sebagian besar belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah Flores masih bergantung pada dana transfer ke daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini juga tentunya akan berpengaruh pada kemandirian daerah dalam melaksanakan kinerja keuangan.

Alokasi PAD terhadap APBD yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam menemukan dan mengeksplorasi potensi pendapatan yang bisa diperoleh di daerahnya. Apabila terjadi peningkatan PAD, maka daerah dapat mengalami peningkatan kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja yang baik telah dilakukan oleh daerah (Antari & Sedana, 2018). Pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program untuk memenuhi kebutuhan daerah apabila pendapatan asli daerah setiap tahunnya bertumbuh. Jika penerimaan PAD makin tinggi, pemerintah memiliki tingkat ketergantungan yang semakin berkurang pada dana transfer ke dari pemerintah pusat.

Selain PAD, salah satu sumber penerimaan daerah adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer ini adalah dana untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Dana ini diberikan apabila daerah mengalami defisit anggaran. Ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD jumlahnya sebesar 80,1% jika dirata-ratakan secara nasional. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya memiliki kontribusi sekitar 12,87%. Tingginya kontribusi dana transfer ke daerah terhadap keuangan daerah menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah dalam bidang keuangan dan kemampuan menggali potensi di daerahnya sendiri masih sangat rendah.

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah oleh pemerintah daerah akan mendorong peningkatan belanja daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Kegiatan belanja daerah saat ini masih tergantung pada besaran dana transfer ke daerah. Penerimaan PAD di daerah masih rendah jika dibandingkan dengan anggaran belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Fenomena yang saat ini sedang terjadi adalah pemerintah daerah masih belum memanfaatkan dana transfer ke daerah secara optimal. Sebesar 64,8 persen DAU yang dialokasikan ke daerah digunakan untuk belanja pegawai.

Hal ini menyebabkan lebih besarnya porsi belanja pegawai daripada belanja modal.

Belanja modal merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang bertujuan memperoleh aktiva tetap dan pemerintah daerah akan memperoleh manfaat jangka panjang. Belanja modal memiliki beberapa ukuran keberhasilan, antara lain memberikan mutu seperti yang diharapkan, Hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan, hasilnya sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaannya tepat waktu, berfokus pada

kepentingan publik, dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih dari alokasi anggaran (Ningrat & Supadmi, 2019). Keberhasilan belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat menyebabkan investasi di daerah tersebut semakin terdorong untuk maju sehingga memiliki dampak bagi peningkatan pendapatan daerah di waktu selanjutnya.

Pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan dicerminkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Realisasi anggaran pemerintah daerah menunjukkan pencapaian kinerja daerah di bidang keuangan dalam satu periode anggaran. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja keuangan juga menjadi bahan evaluasi daerah terhadap pelaksanaan kinerjanya selama satu tahun berjalan. Kinerja keuangan daerah dinilai dengan cara berbeda dengan perusahaan atau sektor swasta. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan pendapatan daerah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

- H1 : PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten Ngada
- H2 : Dana Transfer ke Daerah Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada
- H3 : Belanja Modal Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian dilakukan di 9 Kabupaten yang ada di Wilayah Flores Provinsi NTT. Teknik dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data penelitian untuk memperoleh data sekunder yakni Data Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten di wilayah Flores tahun 2017-2020. Terdapat 36 sampel penelitian. Kinerja keuangan sebagai variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan diukur menggunakan pertumbuhan pendapatan. Sementara itu PAD, dana transfer ke daerah, dan belanja modal menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis terhadap data dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini. *Software* SPSS versi 26 menjadi perangkat yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap data penelitian.

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis regresi linear berganda berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah α = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel bebas X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Transfer ke Daerah (TKD) X_3 = Belanja Modal

e = Tingkat kesalahan pengganggu (standar eror)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif merupakan langkah awal analisis data. Hasil analisis statistic deskriptif ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	30.850.179.939	169.954.164.787	73.289.113.128	34.057.003.639.168
Dana Transfer ke Daerah		9.962.051	934.172.845.582	978.634,97	256.304.220
Belanja Modal		93.001.041.921	273.777.797.529	482.013,31	50.956.479.024.071
Kinerja Keuangan		-36.708.216.389	160.762.405.462	21.762.425.619,86	74.574.992.585,982
<i>Valid N (listwise)</i>					

Sumber : *Data diolah, 2023*

Tabel analisis statistik deskriptif memberikan hasil bahwa 36 berarti terdapat 36 data observasi yang diteliti yaitu terdiri dari data keempat variabel selama periode 2017-2020. Pendapatan asli daerah (X1) memiliki mean sebesar Rp73.289.113.128 dengan nilai standar deviasi Rp34.057.003.639.168 Nilai minimum dari pendapatan asli daerah sebesar Rp30,850,179,939 yang merupakan nilai realisasi PAD di Kabupaten Nagekeo tahun 2018. Nilai maksimum dari pendapatan asli daerah sebesar Rp169.954.164.787 yang merupakan nilai realisasi PAD di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019.

Dana transfer ke daerah (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp728.256.978.634,97 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp104.440.256.304.220 Nilai minimum dari dana transfer ke daerah Rp552.879.962.051 yang merupakan realisasi dana transfer ke daerah di Kabupaten Ngada tahun 2020. Nilai maksimum dari dana transfer ke daerah adalah Rp934.172.845.582 yang merupakan realisasi dana transfer ke daerah di Kabupaten Ende pada tahun 2019. Belanja Modal (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp189.533.482.013,31 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp50.956.479.024,071. Nilai minimum (terendah) dari belanja modal adalah Rp93.001.041.921 yang merupakan realisasi belanja modal di Kabupaten Sikka tahun 2020. Nilai maksimum (tertinggi) dari belanja modal adalah Rp273.777.797.529 yang merupakan realisasi belanja modal di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019.

Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp21.762.425.619,86 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp74.574.992.585,982 Nilai minimum dari kinerja keuangan sebesar -Rp136.708.216.389 yang merupakan nilai kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2020. Nilai maksimum dari kinerja keuangan adalah 160.762.405.462 yang merupakan nilai kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2019.

Uji asumsi klasik dilakukan setelah terjadi analisis statistik deskriptif. Uji ini memastikan bahwa asumsi dasar dalam analisis regresi terpenuhi. Uji normalitas dibutuhkan dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Tabel 5 di bawah ini menyajikan hasil uji normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	36

Normal Parameters	<i>Mean</i>	0,0000095
	<i>Std. Deviation</i>	61.493.801.762,79368600
Most Extreme Differences	<i>Absolute Positive</i>	0,111 0,071
	<i>Negative</i>	-0,111
Test statistic		0,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber : Data penelitian, 2023

Tabel 5 mengenai uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini disimpulkan berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *glejzer*. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Tabel berikut ini menyajikan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients		Unstandardized Standardized		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	2,295E+10	3,670E+10		0,625	0,536
Pendapatan Asli Daerah	0,161	0,175	0,188	0,920	0,364
Dana Transfer ke Daerah	0,010	0,058	0,036	-0,172	0,864
Belanja Modal	0,060	0,109	0,105	0,547	0,588

Sumber : Data penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap korelasi antar variabel independen pada model regresi. Model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas jika hasil menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 serta nilai toleransi lebih dari 10 %. Tabel berikut ini menyajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics Model	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah	0,693	1,444
Dana Transfer ke Daerah	0,677	1,478
Belanja Modal	0,794	1,259

Sumber: Data penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF juga kurang dari 10. Hal ini memiliki makna bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Run-Test*. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

	<i>n</i> standardized <i>Residual</i>
<i>Test Value</i>	9.400.679.885,36696
<i>Cases < Test Value</i>	18
<i>Cases >= Test Value</i>	18
<i>Total Cases</i>	36
<i>Number of Runs</i>	18
<i>Z</i>	-0,169
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,866

Sumber : Data penelitian, 2023

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar 0.866 yang lebih besar dari 0.05. Arti dari nilai ini adalah model regresi ini tidak terdapat mengalami masalah autokorelasi.

Apabila semua asumsi klasik telah terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda. Tabel 9 menampilkan hasil analisis regresi linear berganda.

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>			<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			
1	(<i>Constant</i>)	-1,760E+11	8,029E+11		-2,192	0,036
	Pendapatan Asli Daerah	-0,356	0,384	-0,163	69,364	0,360
	Dana Transfer ke Daerah	0,097	0,127	0,135	-17,399	0,450
	Belanja Modal	0,810	0,239	0,553	1,085	0,002

Sumber : Data penelitian, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda seperti pada Tabel 9, maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,760 - 0,356 X_1 + 0,097X_2 + 0,810X_3$$

Uji kelayakan model dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap ketepatan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan pada penelitian ini. Hasil uji kelayakan model ditampilkan pada tabel 10.

Tabel 10 Uji Anova

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	6,230E+22	3	2,077E+22	5,021	0,006
<i>Residual</i>	1,324E+23	32	4,136E+21		
<i>Total</i>	1,947E+23	35			

Sumber : Data penelitian, 2023

Hasil uji kelayakan model (uji f) pada tabel 10 menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,021 dan nilai signifikansi 0.006 yang nilainya kurang dari 0.05. Hasil ini berarti model regresi dalam penelitian ini layak digunakan atau dengan kata lain prediksi dan penjelasan

terhadap fenomena kinerja keuangan memprediksi pemerintah daerah Kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT oleh ketiga variabel telah tepat.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur bagaimana model regresi mampu menerangkan seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat oleh nilai *adjusted R-Squared* pada tabel 11

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,566	0,320	0,256	6,431E+10

Sumber: *Data Diolah, 2023 (Lampiran 9)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau nilai Adjusted R Square sebesar 0,256 atau 25,6 %. Angka ini berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah dan belanja modal secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan sebesar 25,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini sebesar 74,4 %.

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel-variabel independen (pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah, dan belanja modal) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan). Pengujian tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dilakukan menggunakan uji t. Data pada Tabel 9 menampilkan nilai t dan nilai signifikansi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil analisis pada tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar -0,356, nilai t hitung sebesar -0,928 dan nilai signifikansi sebesar 0.360 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal ini pertumbuhan pendapatan daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, pemerintah daerah masih tetap memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan masih rendah dan belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penerimaan PAD yang tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan menunjukkan bahwa masih belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan serta penelitian yang dilakukan oleh Ningrat dan Supadmi (2019), yang mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ratnasari dan Meirini (2022) yang memberikan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Jawa Timur.

Hasil analisis pada tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi dana transfer ke daerah sebesar 0,097, nilai t hitung 0,764 dan nilai signifikansi 0,450 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan

bahwa dana transfer ke daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana transfer ke daerah yang diterima oleh pemerintah di 9 kabupaten di wilayah Flores, NTT, maka kinerja keuangannya akan mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

Peningkatan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah, akan menyebabkan semakin tingginya alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penyediaan sarana prasarana. Peningkatan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pendapatan oleh pemerintah daerah. Peningkatan dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah juga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan serta sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Budiana dan Rahayu (2020), Mahendra & Barus (2023), Awwaliyah et al (2019), serta penelitian Suambara dan Darmayanti (2020) yang mengemukakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka kinerja keuangan akan semakin baik.

Hasil analisis data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi belanja modal sebesar 0,810, nilai t hitung sebesar 3,383 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini berarti bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah Flores, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga turut mengalami kenaikan. Kenaikan belanja modal yang diperoleh pemerintah daerah akan mendorong terjadinya pertumbuhan pendapatan daerah.

Belanja modal merupakan jenis belanja yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat mendorong terjadinya investasi bagi pemerintah daerah serta dapat meningkatkan sumber-sumber keuangan yang berpotensi menjadi pendapatan asli daerah. Pembangunan infrastruktur yang tepat guna oleh pemerintah daerah akan meningkatkan aksesibilitas di daerah. Hal ini akan menciptakan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di daerah. Oleh karena itu, belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus tepat guna dan diperuntukkan sesuai dengan manfaatnya dan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa dan Haryanto (2019), penelitian Sari dan Mustanda (2019), serta penelitian Ratnasari dan Meirini (2022) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh positif dari belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menandakan bahwa kegiatan belanja modal dapat menyebabkan pertumbuhan pendapatan daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh daerah akan semakin bertambah ketika terjadi peningkatan belanja modal sehingga akan terjadi pemerataan peningkatan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat (Ratnasari dan Meirini, 2022).

SIMPULAN

PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Wilayah Flores Provinsi NTT. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten dalam wilayah Flores, NTT. Dana transfer ke daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di 9 Kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagi pemerintah daerah di 9 Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di masa mendatang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah Kabupaten terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel lainnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini, mengingat masih ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

- Alfiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2019). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi*. Kencana
- Anggreni, N. K. Ay., & Artini, L. G. S. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 8(3), 1315–1345. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v8.i3.p6>
- Anshori, M., & Iswati, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *EJurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of Factors Affecting Capital Expenditures and Their Implications on Government Financial Performance Provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 95–106. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25–46. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Ngada Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Ngada Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2018-2020*.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare by Capital Expenditure and Economic Growth

- as an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>
- Bolen, K. K., & Payamta. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129–147. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583>
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *EProceeding of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- Farouq Ishak, J. (2021). The Impact of Regional Government Financial Performance on Capital Expenditure. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(2), 211–219. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2>
- Halim, A., & Kusufi, S. M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwanis. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90–97.
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Madjodjo, F., Saleh, C. M., & Dahlan, F. (2020). The Influence of Intergovernmental Revenue Budgets and Clarity of Budget Targets on The Financial Performance of Regional Governments: The Case of The Regional Apparatus Organization of The City of Tidore Islands. *Accountability*, 9(2), 60–71. <https://doi.org/10.32400/ja.31234.9.2.2020.6071>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local Government Financial Performance: The Effects of Capital Expenditure and Intergovernmental Revenue (The Case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–17.
- Nilam Kencana Ningrat, C. I., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 683–697. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p15>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834–2861. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>

- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189–1199. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759–4787. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Suambara, I. G. P. P., & Darmayanti, N. P. A. (2020). The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On Regional Financial Performance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 6). www.ajhssr.com
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The Effect of Regional LG Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39–49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tahun 2022. Jakarta.
- Utama, F. R., Evana, E. E., & Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *International Research Journal of Business Studiess*, 12(2), 197–208.
- Utama, M. S. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif untuk Ekonomi dan Bisnis*. CV Sastra Utama.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 85–108. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p04>
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020). The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017. *Advances in Economics, Business, and Management Research*, 127, 152-155.
- Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 1049–1065. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p20>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *CakrawalaRepositori IMWI*, 3(1), 61–74.